



LAPORAN KINERJA 2022



**BPK PERWAKILAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

INTEGRITAS - INDEPENDENSI - PROFESIONAL

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* karena berkat rahmat dan izin-Nya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menyusun Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Laporan ini dibuat dalam rangka merealisasikan reformasi birokrasi dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini berisi tentang *overview*, target dan pencapaian kinerja selama tahun 2022 serta analisis atas pencapaian kinerja sebagai upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berharap laporan ini mampu menjawab kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara serta informasi di dalamnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan memberi data-data bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Batam, 31 Januari 2023
Kepala Perwakilan

Jariyatna
NIP 197001311996031003 ✓

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya	7
E. Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Target Kinerja	10
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Hasil Evaluasi AKIP	12
B. Capaian Kinerja	12
1. IKU 1: Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	15
2. IKU 2: Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	17
3. IKU 3: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	19
4. IKU 4: Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	21
5. IKU 5: Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	23
6. IKU 6: Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	24
7. IKU 7: Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	26
8. IKU 8: Hasil Evaluasi AKIP	27
9. IKU 9: Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	28
10. IKU 10: Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	29
11. IKU 11: Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	31
12. IKU 12: Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	32
13. IKU 13: Tingkat Kinerja Anggaran	33

C. Analisis Efisiensi	34
D. Perubahan Budaya Kerja	35
E. Realisasi Anggaran	36
F. Inovasi	37
G. Penghargaan	37
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022	8
Tabel 2.1	Indikator dan Target Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Kepulauan Riau Tahun 2022	11
Tabel 3.1	Target dan Realiasi Pencapaian Kinerja Tahun 2022	12
Tabel 3.2	Tren Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 - 2022	14
Tabel 3.3	Tren Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 - 2022	15
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 per Tahun	16
Tabel 3.5	Rincian Realisasi Anggaran IKU 1	16
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2 per Tahun.....	17
Tabel 3.7	Rincian Realisasi Anggaran IKU 2	18
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3 per Tahun	19
Tabel 3.9	Rincian Realisasi Anggaran IKU 3	21
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 4 per Tahun	22
Tabel 3.11	Rincian Realisasi Anggaran IKU 4.....	22
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 5 per Tahun	23
Tabel 3.13	Rincian Realisasi Anggaran IKU 5	23
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 6 per Tahun	24
Tabel 3.15	Rincian Realisasi Anggaran IKU 6	25
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 7 per Tahun	26
Tabel 3.17	Rincian Realisasi Anggaran IKU 7	26
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 8 per Tahun	27
Tabel 3.19	Rincian Realisasi Anggaran IKU 8	27
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 9 per Tahun	28
Tabel 3.21	Rincian Realisasi Anggaran IKU 9	29
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 10 per Tahun	30
Tabel 3.23	Rincian aktivitas IKU 10	30
Tabel 3.24	Rincian Realisasi Anggaran IKU 10	30
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 11 per Tahun	31
Tabel 3.26	Rincian Realisasi Anggaran IKU 11	32
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 12 per Tahun	32
Tabel 3.28	Rincian Realisasi Anggaran IKU 12	33
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 13 per Tahun	34
Tabel 3.30	Rincian Realisasi Anggaran IKU 13	34

Tabel 3.31 Rincian Realisasi Anggaran	36
Tabel 4.1 Indikator Kinerja yang Mencapai Target	38
Tabel 4.2 Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	7
Gambar 1.3 Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	8
Gambar 3.1 Tren Capaian Kinerja BPK Provinsi Perwakilan Riau	13
Gambar 3.2 Penyampaian LHP Semester II 2022	18
Gambar 3.3 Pembahasan Percepatan TLRHP dengan Pemprov Kepri	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan tersebut merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pengukuran atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan telah ditandatangani oleh Tortama KN V dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari 2022. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga pemeriksa yang diberikan amanat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara serta untuk melaksanakan amanat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23G ayat (1) yang berbunyi "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi", maka berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 34/K/IVIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2007 dibentuk Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang yang berkedudukan di Batam. Selanjutnya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang diresmikan pada tanggal 29 November 2007.

Pada perkembangannya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur. Sesuai dengan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 01/K/IXIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang berubah menjadi BPK RI

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berubah menjadi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Memasuki tahun ketujuh sejak berdirinya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, kantor Perwakilan BPK RI yang terletak di Jalan Raja Isa Batam Center telah diresmikan penggunaannya oleh Ketua BPK RI, Bapak Drs. Hadi Poernomo, Ak. pada tanggal 13 Maret 2012. Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diresmikan memiliki luas tanah sebesar 6.000 m² dengan luas bangunan sebesar 3.506 m².



Gambar 1.1 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami tujuh periode kepemimpinan, yaitu Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho periode November 2007 s.d. September 2010, Drs. Parna M.M. periode September 2010 s.d. Juli 2014, Isman Rudy S.E., M.M. periode Juli 2014 s.d. Januari 2017, Joko Agus Setyono S.E., Ak., CSFA, CPA., CA. periode Januari 2017 s.d. Agustus 2018, Indria Syzinia S.E., M.Si., CSFA, Ak., CA periode Agustus 2019 s.d. Januari 2021, Widhi Widayat S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA. periode Februari s.d. September 2021, Masmudi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA. periode November 2021 s.d Juli 2022 dan Jariyatna S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK, CSFA periode Agustus 2022 s.d sekarang.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK RI yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK RI melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V). BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan negara/daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari: (i) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah; (ii) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah dan lembaga terkait di lingkungan pemerintah daerah; dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (*audit on request*).

Pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;

7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan

Pemeriksa Keuangan Nomor 03/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan bahwa organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditorat Utama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sub Auditorat Kepulauan Riau

Sub Auditorat Kepulauan Riau mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, untuk:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;

- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

Selain itu, Sub Auditorat Kepulauan Riau juga bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

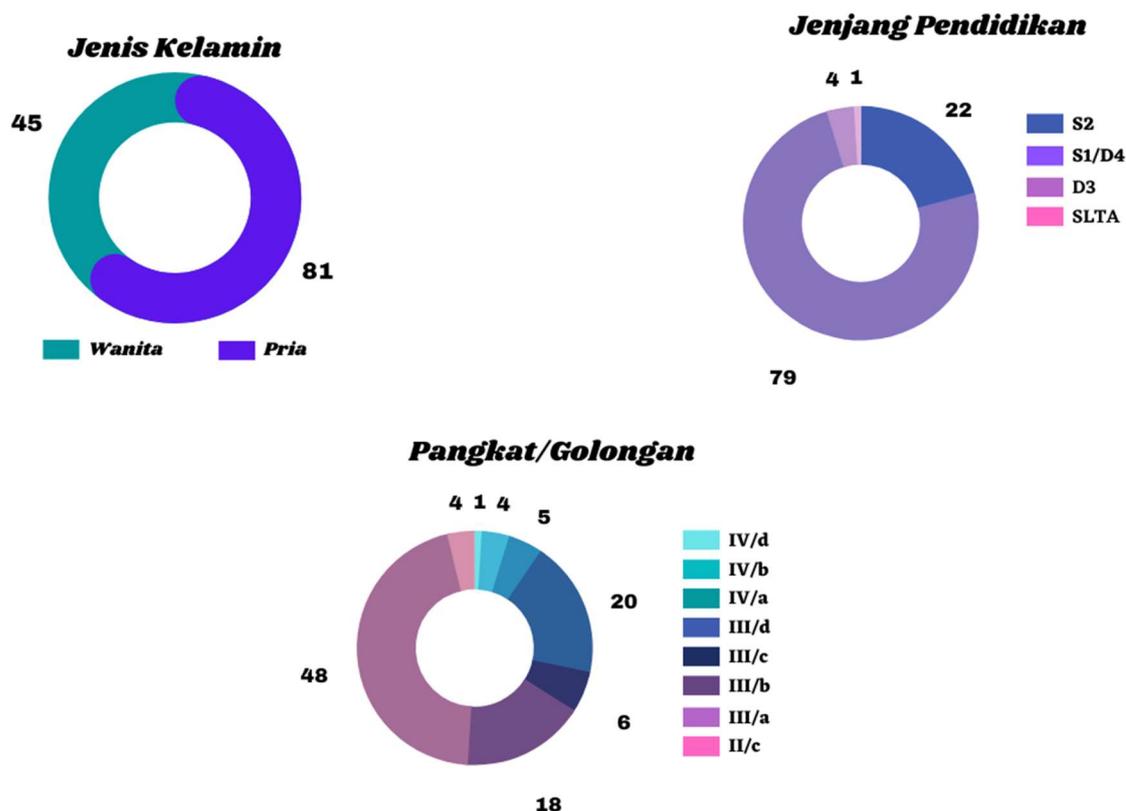
D. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, sumber daya manusia yang dimiliki per 31 Desember 2022 berjumlah 126 orang yang terdiri dari.

1. Kepala Perwakilan: 1 (satu) orang
2. Kepala Sekretariat: 1 (satu) orang
3. Kepala Subauditorat: 1 (satu) orang
4. Kepala Subbagian: 5 (lima) orang
5. Pejabat Fungsional Pemeriksa: 78 (tujuh puluh delapan) orang
6. Staf Pendukung dan Penunjang: 20 (dua puluh) orang
7. Tenaga Tidak Tetap: 20 (dua puluh) orang

Sumber daya manusia tersebut dapat dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, pangkat/golongan, dan jenjang Pendidikan sebagaimana berikut.



Gambar 1.3 Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

2. Sumber Daya Keuangan

Selain sumber daya manusia, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki sumber daya keuangan. Adapun pagu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.473.624.000,00. Pagu anggaran tersebut dialokasikan pada 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sampai dengan Desember 2022, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp17.208.507.922 atau 98,48% dari pagu anggaran. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
51	Belanja Pegawai	5.879.750.000	5.840.344.477	99,33%
52	Belanja Barang	11.016.149.000	10.795.656.586	98,00%
53	Belanja Modal	577.725.000	572.506.859	99,10%
Jumlah		17.473.624.000	17.208.507.922	98,48%

E. Isu Strategis

Harapan atas peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang semakin tinggi, dipenuhi dengan penyusunan rencana strategis yang dituangkan dalam Renstra BPK 2020 - 2024. Untuk meningkatkan peran tersebut diperlukan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta mutu kelembagaan BPK yang modern dengan memanfaatkan perbaikan sistem dan kemajuan teknologi informasi.

Kerangka pengembangan Renstra BPK 2020 - 2024 dilakukan melalui identifikasi dan analisis atas isu-isu yang terjadi pada setiap bagian organisasi. Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan hasil analisa perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu dan lingkungan strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.

1. Isu Strategis yang meliputi:

- a. Tema pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. Ketersediaan sumber daya untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas tinggi;
- c. Optimalisasi dukungan manajemen pemeriksaan dan nonpemeriksaan;
- d. Pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk menilai dampak hasil pemeriksaan; dan
- e. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

2. Lingkungan Strategis yang meliputi:

- a. Agenda Pembangunan Nasional 2020 – 2024;
- b. *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
- c. Perkembangan Nasional/Internasional;
- d. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)*;
- e. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- f. Dampak Pandemi COVID-19.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai dengan fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI, maka Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020 – 2024 disusun sebagai turunan dan penjabaran yang lebih detail dari Renstra BPK 2020 - 2024 dan Renstra Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) 2020 - 2024 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun.

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Agar dapat mengukur keberhasilan pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan Auditor Utama Keuangan Negara V selaku atasan langsung pada bulan Januari 2022. Pada Perjanjian Kinerja tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran. Adapun target Kinerja BPK Perwakilan Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Kepulauan Riau Tahun 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	Rp17.473.624.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp6.457.475.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp11.016.149.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Rencana Aksi pencapaian kinerja triwulanan. Rencana Aksi ini membahas mengenai strategi pelaksanaan kegiatan yang secara langsung akan mempengaruhi pencapaian kinerja yang akan dilaksanakan pada tiap triwulan dalam satu tahun anggaran. Rencana Aksi secara detail dapat dilihat dalam Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai target, pengenalan masalah yang terjadi serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja di BPK. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Utama (Itama) BPK terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Kerja. Evaluasi AKIP bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

B. Capaian Kinerja

Secara keseluruhan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor pencapaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,51. Skor ini mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin dibandingkan skor tahun 2021 yaitu sebesar 100,37. Rincian pencapaian kinerja selama 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel 3.1.

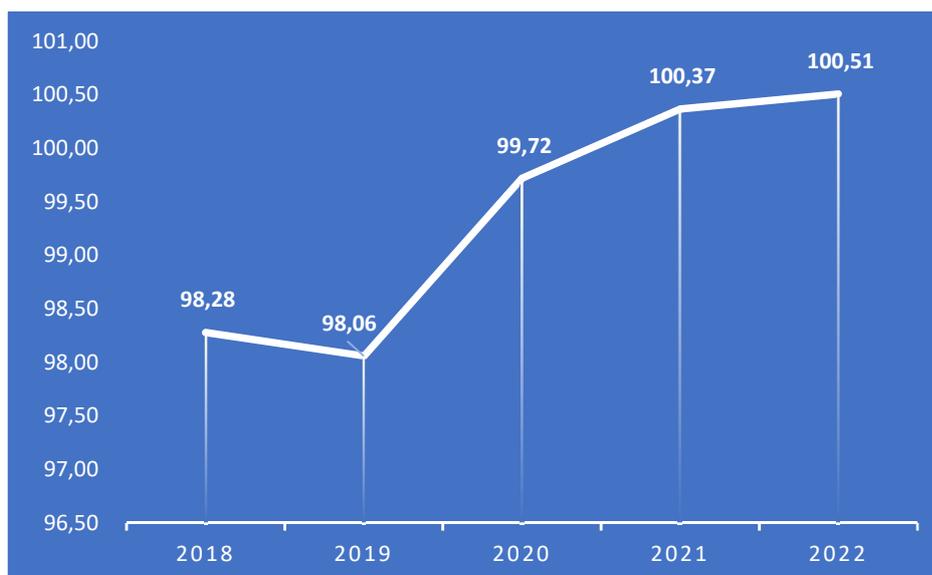
Tabel 3.1 Target dan Realiasi Pencapaian Kinerja Tahun 2022

	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Skor Kinerja
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95,56%	95,56
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	86,09%	105,00
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,31%	100,31
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,97%	100,97
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,60)	92,00
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	A (92,94)	105,00
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	95,89%	98,85
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100,71%	100,71
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,84)	101,05
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,27%	102,58

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja yang meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 pada seluruh Entitas di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksa Kepatuhan pada beberapa Entitas di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Entitas untuk meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
4. Melakukan Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal;
5. Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait nilai-nilai dasar BPK kepada para Pegawai;
6. Meningkatkan penggunaan Teknologi dan Informasi seperti pemanfaatan aplikasi SISDM, JASMIN, PRISMA, SMP, SiAP, dan SiPTL;
7. Melaksanakan Aktivitas Manajemen Pengetahuan dan penyusunan *Best Practice*;
8. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalitas Pegawai; dan
9. Melakukan efisiensi Anggaran.

Pada Tahun 2022, capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 100,51. Skor tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 100,37. Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan mengalami kenaikan. Adapun tren skor capaian kinerja telah disajikan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tren Capaian Kinerja BPK Provinsi Perwakilan Riau

Secara keseluruhan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2018. Adapun penurunan capaian kinerja terjadi pada tahun 2019. Berkenaan dengan penurunan skor kinerja tahun 2019, beberapa cara telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki pencapaian kinerja sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,66.

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tren Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 - 2022

	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	95,56%	95,56%	84,38%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	86,09%	85,71%	81,39%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,31%	100,23%	100,53%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,97%	100%	100%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,60)	Sangat Memuaskan (4,40)	Sangat Memuaskan (4,62)
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	A (92,94)	A (88,40)	A (89,13)
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	95,89%	99,35%	99,35%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100,71%	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,84)	Memuaskan (3,97)	Memuaskan (3,82)
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	98,39%	95,71%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,27%	90,21%	90,78%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target Renstra BPK Perwakilan Kepulauan Riau sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Tren Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 - 2022

Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja					Realisasi 2022	Capaian Tahun 2022 thd Target Tahun 2024	
	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	95,56%	95,56%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	86,09%	114,79%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,31%	100,31%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,97%	100,97%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,60	92,00%
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	A (92,94)	A (103,21%)
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	95,89%	95,89%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100,71%	100,71%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,84	101,05%
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	90,27%	101,77%

Penjelasan atas pencapaian IKU Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. IKU 1 (Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan)

IKU pertama BPK Perwakilan Kepulauan Riau adalah tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan. Indikator ini merupakan indikator yang berfungsi untuk mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan yang dibagi cara pengendaliannya baik secara internal dan eksternal. Adapun pengendalian yang dilakukan secara internal oleh BPK Perwakilan Kepulauan Riau yaitu *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)*. Sedangkan yang dilakukan secara eksternal yaitu melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 per Tahun

Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	84,38%	95,56%	95,56%	-	-
Capaian	84,38	95,56	95,56	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	84,38%	95,56%	95,56%	-	-

Realisasi IKU Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan Tahun 2022 sebesar 95,56% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 95,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja lebih kecil daripada target sebagaimana yang tercantum, baik dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2022 maupun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024, yaitu sebesar 100%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dengan realisasi Tahun 2021. Pada dasarnya, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan setiap tahapan pemeriksaan dengan profesional sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian internal terhadap QA dan QC pada setiap tingkatan peran dalam penugasan (Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab) maupun tingkatan jabatan struktural yang berkaitan dengan pemeriksaan (Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan) yang menyatakan bahwa seluruh tahapan penugasan pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP (terkait akurasi dan konsistensi) dan hasil revidi Inspektorat Utama pada tahun 2022, ditetapkan bahwa proses QA dan QC pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau masih belum sempurna sehingga capaian kinerja pada IKU 1 ditetapkan maksimal sebesar 95,56%.

Dalam merealisasikan IKU 1 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Rincian Realisasi Anggaran IKU 1

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	1.486.615.896,00

Dalam rangka meningkatkan dan mencapai kinerja yang optimal terutama IKU 1 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu pemenuhan pengendalian dan

pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah dan akan selalu melaksanakan upaya-upaya strategis antara lain sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan proses perencanaan, misalnya:
 - 1) Pembagian tugas penyusunan materi pada program pemeriksaan secara lintas tim. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian persiapan pemeriksaan pendahuluan di semester II 2022; dan
 - 2) Merumuskan format LHP yang ringkas dan informatif (*full disclosure*) pada pelaporan pemeriksaan semester II 2022.
 - b. Membuka ruang kontribusi entitas untuk menyediakan data dan informasi sebagai salah satu bahan untuk penentuan area pemeriksaan.
2. IKU 2 (Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan)

IKU 2 BPK Perwakilan Kepulauan Riau yaitu Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. IKU ini merupakan hasil evaluasi atas kesesuaian antara Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2 per Tahun

Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	-	-
Capaian	100	100	100	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	-	-

Pada IKU 2 ini, realisasi capaian kinerjanya sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Capaian ini sama dengan target sebagaimana yang tercantum, baik dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2022 maupun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024.

Capaian Kinerja tahun 2022 pada IKU 2 ini sama dengan capaian kinerja tahun 2021 dengan skor 100%. IKU ini diukur atas seluruh LHP Kinerja dan DTT (3 LHP Kinerja dan 4 LHP DTT) berdasarkan evaluasi dari Direktorat EPP. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2022 ini, Direktorat EPP menilai bahwa terdapat kesesuaian antara Simpulan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan penugasan yang tertuang dalam

setiap Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas LHP yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah secara profesional memenuhi standar dan kriteria pelaporan yang ditetapkan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif (akuntabel). Capaian yang optimal pada IKU ini secara langsung nantinya akan membawa BPK semakin dekat dengan salah satu visi-nya, yaitu menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya.



Gambar 3.2 Penyampaian LHP Semester II 2022

Untuk mencapai realisasi IKU 2 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Rincian Realisasi Anggaran IKU 2

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	4.361.590.845,00

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik pada IKU 2 ini. Upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam hal penyempurnaan proses perencanaan dan pola komunikasi, baik internal (antara pimpinan dengan pelaksana maupun antar pelaksana di dalam pemeriksaan) maupun eksternal (antara BPK Perwakilan dengan entitas yang diperiksa serta para pemangku kepentingan lainnya) sehingga hasil pemeriksaan apa yang menjadi harapan di dalam penugasan dapat tercapai berkat perencanaan yang matang sekaligus dapat terkomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan merancang P2 secara profesional sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan namun tetap relevan dengan kondisi terkini yang terjadi di lapangan sehingga akan menghasilkan simpulan hasil pemeriksaan yang tepat dan obyektif serta selaras dengan harapan penugasan. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan pencapaian kinerja IKU 2 dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

3. IKU 3 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan)

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara dalam periode Renstra. IKU ini mengukur persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh auditee yang telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 20 menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3 per Tahun

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	81,39%	85,71%	86,09%	-	-
Capaian	105	105	105	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	108,52%	100,23%	114,78%	-	-

Berdasarkan hasil data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, diketahui bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 86.09%. Capaian IKU 3 di Tahun 2022 ini lebih besar dari target yang ditetapkan, baik yang ada di PK tahun 2022 maupun yang ada di Renstra, yaitu sebesar 75%.

Sampai dengan Desember 2022, berdasarkan data pemantauan TLRHP dari Direktorat EPP, dari 8.410 rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, 7.257 rekomendasi diantaranya telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan 1.082 rekomendasi yang telah disampaikan

dinyatakan belum sesuai atau masih dalam proses ditindaklanjuti dan sisanya sebanyak 71 rekomendasi belum ditindaklanjuti sama sekali.

Realisasi persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan lebih tinggi daripada target Renstra dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2022 secara berkala telah melakukan upaya-upaya yang berkelanjutan dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan, antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam menggesa penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Pemda;
- b. Melakukan pembahasan secara internal antara pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan tim dosir terkait rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti;
- c. Merumuskan saran/masukan praktis yang dapat menjadi petunjuk bagi Pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi yang belum selesai; dan
- d. Berkomunikasi intensif dengan pimpinan Pemda untuk meminta komitmen dan kerja sama dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum selesai sekaligus menyampaikan rumusan saran/masukan yang sudah dihasilkan untuk dapat segera dijalankan.



Gambar 3.3 Pembahasan Percepatan TLRHP dengan Pemprov Kepri

Dalam pencapaian realisasi IKU 3, dibutuhkan dukungan anggaran dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Rincian Realisasi Anggaran IKU 3

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	104.961.480,00

Selain telah melakukan upaya yang berkelanjutan seperti di atas, untuk semakin meningkatkan penyelesaian TLRHP oleh pemerintah daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga mempertahankan dan melanjutkan upaya-upaya strategis yang telah dilakukan serta dengan menemukan terobosan-terobosan lainnya seperti, melakukan pembahasan dan diskusi dengan pemerintah daerah di sela-sela kegiatan pemeriksaan dalam rangka menemukan solusi alternatif atas setiap permasalahan yang menghambat penyelesaian TLRHP.

4. IKU 4 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional)

Indikator Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tugas dan fungsi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pemeriksaan tematik nasional pada satu entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan nama pemeriksaan "Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Aksi/Subaksi Pembentukan UKPBJ, Implementasi *E-Payment* dan E-Katalog) TA 2019 s.d. 2022 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang".

Kegiatan pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan pada Semester II 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sehingga capaian atas IKU 4 ini dinilai sesuai dengan target. Adapun skor realisasi IKU 4 ini sebesar 100,31%. Pencapaian kinerja ini lebih tinggi 0,31% daripada

PK dan target pada Renstra. Capaian realisasi kinerja IKU 4 telah disajikan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 4 per Tahun

Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100,53%	100,23%	100,31%	-	-
Capaian	100,53	100,23	100,31	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,53%	100,23%	100,31%	-	-

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional yang sejalan dengan tema pembangunan nasional, terutama dalam rangka Agenda Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berdasarkan perhitungan atas kontribusi keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada pemeriksaan tematik nasional tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi skor tambahan sebesar 0,31. Capaian kinerja ini selaras dengan target kinerja yang dicanangkan dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024, yaitu terlibat dan berperan aktif dalam pemeriksaan tematik nasional dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah sehingga diharapkan hasil pemeriksaan BPK ini nantinya akan langsung berdampak positif terhadap masyarakat Kepulauan Riau dan akan membawa BPK semakin dekat dengan salah satu visi-nya, yaitu menjadi lembaga pemeriksa yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai realisasi IKU 4 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11 Rincian Realisasi Anggaran IKU 4

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	338.786.500,00

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya untuk konsisten terlibat dalam kegiatan pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's, sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 demi mendukung agenda pembangunan nasional yang dampaknya signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

5. IKU 5 (Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan)

Indikator tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan merupakan indikator yang menunjukkan tingkat responsif BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Instansi Penegak Hukum (IPH). Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak memperoleh permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Dikarenakan IKU ini bersifat pemenuhan dan hanya diukur ketika ada permintaan pemeriksaan, maka realisasinya dianggap 100%. Pencapaian kinerja ini sama dengan skor tahun 2022 dan target pada Renstra. Capaian realisasi kinerja IKU 5 telah disajikan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 5 per Tahun

Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100%	100%	-	-
Capaian	100	100	100	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	-	-

Meskipun pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak memperoleh permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan, namun BPK selalu berkomitmen untuk semaksimal mungkin dapat memenuhi setiap permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam rangka mengampanyekan inisiatif ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk mengoptimalkan saluran-saluran komunikasi dengan para pemangku kepentingan, baik dalam bentuk pertemuan, sosialisasi, seminar, maupun dalam bentuk kampanye-kampanye yang bersifat edukasi dan himbauan dalam jaringan (*online*) melalui kanal media sosial perwakilan. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan kehadiran BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan semakin dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai realisasi IKU 5 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13 Rincian Realisasi Anggaran IKU 5

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	0,00

6. IKU 6 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal)

Indikator tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

Pada Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan pemeriksaan tematik lokal pada 2 (dua) entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2020 s.d. 2021 dan Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022. Kegiatan pemeriksaan tematik lokal yang dilakukan pada Semester II 2022 ini sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sehingga capaian atas IKU 6 ini dinilai sesuai dengan target, yaitu 100,97%. Pencapaian ini lebih tinggi dari PK dan Renstra. Capaian IKU 6 ini telah disajikan pada tabel 3.13.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 6 per Tahun

Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100,3%	100,97%	-	-
Capaian	100	100,3	100,97	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100,3%	100,97%	-	-

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, tetapi juga melaksanakan pemeriksaan tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terlibat dalam beberapa pemeriksaan tematik lokal dalam rangka menyikapi dinamika isu strategis di Kepulauan Riau, terutama yang juga terkait langsung dengan Agenda Pembangunan Nasional di daerah, dalam hal ini terkait dengan Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan (PN2-PP1).

Berdasarkan perhitungan atas kontribusi keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada pemeriksaan tematik lokal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi skor tambahan sebesar 0,97. Capaian kinerja ini selaras dengan target kinerja yang dicanangkan dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024, yaitu terlibat dan berperan aktif dalam pemeriksaan tematik lokal dalam rangka mendukung program pemerintah daerah sehingga diharapkan hasil pemeriksaan BPK ini nantinya akan langsung berdampak positif terhadap masyarakat Kepulauan Riau dan akan membawa BPK semakin dekat dengan salah satu visi-nya, yaitu menjadi lembaga pemeriksa yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Sementara itu, alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai realisasi IKU 6 pada DIPA BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.15 Rincian Realisasi Anggaran IKU 6

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	510.241.928,00

Dalam mempertahankan capaian skor IKU 6, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya untuk konsisten terlibat dalam kegiatan pemeriksaan tematik lokal berdasarkan Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, sebagaimana yang telah dituangkan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024. Namun demikian rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan dalam Renstra terbatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan juga bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

7. IKU 7 (Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK)

Indikator ini berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Skor Indeks atas Implementasi Nilai Dasar BPK di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 7 per Tahun

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (5,00)				
Realisasi *)	Sangat Memuaskan (4,62)	Sangat Memuaskan (4,40)	Sangat Memuaskan (4,60)	-	-
Capaian	92,4	88	92	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	92,4%	88%	92%	-	-

Berdasarkan target kualitatif capaian kinerja pada IKU 7 sudah sesuai dengan target karena indeks tersebut (4,60) masih masuk kategori sangat memuaskan.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai realisasi IKU 7 sebagaimana disajikan pada tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.17 Rincian Realisasi Anggaran IKU 7

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	1.486.615.896,00

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada IKU 7 ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berencana akan mengintensifkan upaya kampanye edukasi terkait nilai-nilai dasar BPK kepada para pegawai, misalnya melalui kegiatan pengarahan Kepala Perwakilan menjelang setiap kegiatan pemeriksaan, melalui amanat Inspektur Upacara pada setiap kegiatan upacara hari besar nasional yang diselenggarakan di kantor dan pertemuan-pertemuan lainnya yang melibatkan seluruh komponen pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Riau dan yang paling penting adalah pimpinan menjadi role model terkait konsistensi penerapan nilai-nilai dasar BPK serta memberikan apresiasi dan teguran terhadap penerapan nilai-nilai dasar BPK sehingga pegawai akan merasakan manfaat nyata dari ketaatan penerapan nilai-nilai dasar BPK tersebut. Harapannya, dengan adanya kampanye yang

intensif dan masif dari pimpinan terkait substansi dan makna nilai-nilai dasar BPK dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari maka hal itu akan semakin menginternalisasi para pegawai.

8. IKU 8 (Hasil Evaluasi AKIP)

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama (Itama) BPK terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Capaian kinerja atas hasil evaluasi AKIP di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 8 per Tahun

Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
Realisasi *)	A (89,13)	A (88,40)	AA (92,94)	-	-
Capaian	103,64	101,61	105,00	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,98%	98,17%	103,21%	-	-

Capaian IKU 8 ini lebih tinggi daripada capaian pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP terhadap akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, diperoleh nilai AA (92,94). Nilai ini, lebih besar dari target PK yang ditetapkan sebesar 88,00 dan target Renstra sebesar 90,05.

Secara umum, berdasarkan skor yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah mampu menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2022 secara akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan publik secara keseluruhan.

Untuk mencapai realisasi IKU 8, Alokasi anggaran yang disediakan pada DIPA BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19 Rincian Realisasi Anggaran IKU 8

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Hasil Evaluasi AKIP	1.486.615.896,00

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja atas hasil evaluasi AKIP, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk

menyusun Laporan Kinerja semaksimal mungkin sehingga dapat secara obyektif menggambarkan capaian-capaian kinerja yang telah diperoleh selama tahun penilaian. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja sehingga *output* yang dihasilkan nantinya mampu menjawab setiap indikator yang dinilai dalam AKIP secara tepat, akurat dan obyektif. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tim penyusun Laporan Kinerja salah satunya dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan workshop yang secara langsung berkaitan dengan proses penyusunan dan pelaporan manajemen kinerja satker maupun yang berkaitan dengan implementasi atas evaluasi mandiri AKIP. Dan yang paling penting diantara semua itu adalah BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan senantiasa berupaya memperbaiki kinerjanya, terutama atas indikator-indikator kinerja yang masih belum memenuhi target dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang strategis dan terukur.

9. IKU 9 (Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi)

BPK telah menyediakan layanan Teknologi dan Informasi bagi seluruh pegawai melalui Biro TI yang meliputi layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan Big Data Analytics) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Aplikasi Manajemen Pengetahuan mengintegrasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi. aplikasi yang telah digunakan di BPK, antara lain Portal BPK, JDIH, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi *user* untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan. Sumber perhitungan atas tingkat pemanfaatan TI adalah laporan *IT culture* dari Biro TI.

Pada tahun 2022, tingkat pemanfaatan TI pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 95,89%. Realisasi ini lebih rendah dari target Tahun 2022 yaitu 97%. Capaian kinerja atas pemanfaatan TI di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3.19.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 9 per Tahun

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi *)	99,35%	99,35%	95,89%	-	-
Capaian	104,57	103,48	98,85	-	-

Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	104,57%	103,48%	97,95%	-	-
---	---------	---------	--------	---	---

Kedepannya, untuk dapat mencapai target Renstra, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk melakukan beberapa hal, antara lain.

- Optimalisasi implementasi aplikasi SIAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan);
- Implementasi sistem kerja yang mengedepankan pemanfaatan aplikasi pendukung perkantoran, baik bidang pemeriksaan maupun bidang kesekretariatan; dan
- Kampanye internal oleh para pimpinan, dengan dibantu oleh para atasan unit kerja, melalui kanal media sosial internal perwakilan (*Whatsapp group*) dan melalui *e-mail blast* yang ditujukan ke alamat *e-mail* pribadi setiap pegawai, terkait urgensi dan himbauan untuk memanfaatkan aplikasi pendukung perkantoran.

Upaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut adalah untuk membentuk pola pikir dan pola kerja pegawai yang mengedepankan *IT culture*. Hal ini diharapkan dapat membuat pegawai menjadi sangat bergantung dengan keberadaan teknologi informasi hingga akhirnya terus berkembang dan memengaruhi budaya organisasi.

Dalam rangka mendukung realisasi IKU 9, dibutuhkan dukungan anggaran dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.20.

Tabel 3.21 Rincian Realisasi Anggaran IKU 9

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	1.486.615.896,00

10. IKU 10 (Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan)

Manajemen Pengetahuan merupakan upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi, pengesahan oleh satker yang berwenang, dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran informasi/pengetahuan*. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *reviu pasca aktivitas*, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan,

forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan *mentoring* sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Capaian kinerja pada IKU 10 ini lebih tinggi daripada pencapaian pada tahun 2021 dan target PK serta Renstra. Capaian kinerja atas tingkat penerapan manajemen pengetahuan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.21.

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 10 per Tahun

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100%	100,71%	-	-
Capaian	100	100	100,71	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100,71%	-	-

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan 5 (lima) Laporan Aktivitas Manajemen Pengetahuan dan 1 (satu) Laporan *Best Practice* kepada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan (Ditama Revbang). Laporan Aktivitas Manajemen Pengetahuan tersebut telah dinilai memenuhi syarat oleh Ditama Revbang sehingga berhasil memenuhi target capaian IKU 10 sebesar 100,71%.

Berikut daftar penerapan Manajemen Pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.

Tabel 3.23 Rincian aktivitas IKU 10

Aktivitas Manajemen Pengetahuan		Judul Aktivitas
1.	Forum Berbagai Pengetahuan	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pegawai
2.	Forum Berbagai Pengetahuan	Pemanfaatan Aplikasi <i>Digipay</i>
3.	Pendidikan dan Pelatihan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.	Mentoring	Aktualisasi CPNS Formasi Tahun 2021
5.	<i>Peer assist</i>	Pengadministrasian surat masuk dan surat keluar pada Subbag Humas dan TU Kalan
6.	Penyusunan <i>Best Practice</i>	Layanan <i>B'Welcome</i>

Dalam rangka mencapai realisasi IKU 10, Alokasi anggaran yang disediakan pada DIPA BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.24 Rincian Realisasi Anggaran IKU 10

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Penerapan Manajemen Pengetahuan	1.486.615.896,00

Dalam upaya pencapaian kinerja penerapan manajemen di perwakilan, masih terdapat beberapa kendala, hal yang paling signifikan adalah belum terbangunnya kesadaran dan pemahaman yang utuh dari seluruh pihak di perwakilan mengenai urgensi Manajemen Pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi yang berperan membantu proses pengambilan keputusan baik peningkatan kinerja organisasi. Sampai saat ini bagi sebagian besar kalangan, Manajemen Pengetahuan masih dilihat sebagai beban, bukan sebagai kebutuhan. Hal ini mengakibatkan pengelola Manajemen Pengetahuan mendapatkan banyak tantangan dan hambatan dalam menyelenggarakan aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengelola Manajemen Pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk secara konsisten dan masif mengampanyekan tentang urgensi dan peranan Manajemen Pengetahuan bagi individu pegawai dan organisasi melalui aktivitas dan saluran-saluran komunikasi, seperti melalui rapat-rapat pejabat struktural, melalui kegiatan pengarahan Kepala Perwakilan kepada para pegawai, melalui media sosial perwakilan, dan sarana-sarana lainnya yang relevan demi memunculkan kesadaran dan pemahaman yang utuh para pegawai terhadap Manajemen Pengetahuan.

11. IKU 11 (Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi)

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) atau Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan TU Kalan). Indikator ini bertujuan untuk mendorong Subbagian Humas atau Subbagian Humas dan TU Kalan Perwakilan agar dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dinilai memuaskan dengan skor 3,84. Realisasi ini melebihi target kinerja yang dipatok sebesar 3,80. Realisasi capaian IKU 11 ini dapat dilihat pada tabel 3.24.

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 11 per Tahun

Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)

Realisasi *)	Memuaskan (3,82)	Memuaskan (3,97)	Memuaskan (3,84)	-	-
Capaian	100,53	104,47	101,05	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,53%	104,47%	101,05%	-	-

Dalam rangka mencapai realisasi IKU 11, Alokasi anggaran yang disediakan pada DIPA BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26 Rincian Realisasi Anggaran IKU 11

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	1.486.615.896,00

12. IKU 12 (Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi)

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
- Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014); dan
- Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, IKU 12 ini ditargetkan mencapai 100%, artinya seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan dapat memenuhi standar jam pelatihan yang ditetapkan. Adapun pencapaian IKU 12 ini sebagaimana telah disajikan pada tabel 3.26.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 12 per Tahun

Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	95,71%	98,39%	-	-	-
Capaian	95,71	98,39	-	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	95,71%	98,39%	-	-	-

Terkait pemenuhan IKU 12, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaiannya adalah dengan membahas terkait pemenuhan jam diklat oleh pegawai pada setiap rapat pejabat struktural yang digelar secara periodik, minimal satu bulan sekali, sehingga para atasan langsung dapat terinfokan pegawai-pegawai mana saja yang

belum memenuhi target minimal jam diklat sehingga harus segera didorong untuk mendaftarkan diri mengikuti diklat. Selain itu, upaya untuk mendorong pegawai melaksanakan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai yang dipersyaratkan, akan semakin diintensifkan.

Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan diklat melalui kanal media sosial internal perwakilan (*Whatsapp group*) dan melalui *e-mail blast* yang ditujukan ke alamat email pribadi setiap pegawai yang disertai dengan formulir pendaftaran keikutsertaan diklat. Selain itu, agar tujuan diklat tepat sasaran Subbagian SDM melakukan pemetaan kompetensi teknis yang dibutuhkan tiap-tiap pegawai sesuai dengan minimum persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sehingga pelaksanaan diklat tidak hanya untuk pemenuhan jam diklat, tapi dapat memberikan nilai tambah kepada pegawai, dan melakukan evaluasi efektifitas pemenuhan jam diklat dengan peningkatan kompetensi pegawai tersebut.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai realisasi IKU 12 sebagaimana disajikan pada tabel 3.27 berikut.

Tabel 3.28 Rincian Realisasi Anggaran IKU 12

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	1.486.615.896,00

13. IKU 13 (Tingkat Kinerja Anggaran)

Pelaksanaan seluruh tugas di BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat yang maksimal kepada organisasi.

Melalui IKU 13 ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran negara dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan BPK, tingkat kinerja anggaran di lingkungan BPK

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah sebesar 90,27%. Realisasi ini lebih besar dari target Tahun 2022 yakni 88,00% seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.28.

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 13 per Tahun

Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%
Realisasi *)	90,78%	90,21%	90,27%	-	-
Capaian	104,35	103,1	102,58	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	102,34%	101,70%	101,77%	-	-

Alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung tercapainya realisasi IKU 13 sebagaimana disajikan pada tabel 3.29 berikut.

Tabel 3.30 Rincian Realisasi Anggaran IKU 13

Nama Keluaran	Realisasi (Rp)
Tingkat Kinerja Anggaran	1.486.615.896,00

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yaitu meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder, maka dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, dan efisiensi anggaran, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi selalu menjadi perhatian khusus bagi pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya menyikapi dampak pandemi Covid-19 yang sampai dengan awal Desember 2022 masih berlangsung. Implementasi beberapa aplikasi esensial, baik dalam bidang pemeriksaan maupun bidang pendukung lainnya, terus digesa sehingga kinerja organisasi dapat terus berjalan meskipun dengan adanya beberapa keterbatasan mempertimbangkan dampak pandemi. Beberapa aplikasi penting yang menjadi tulang punggung di BPK Perwakilan dan senantiasa didorong oleh pimpinan adalah aplikasi bidang pemeriksaan seperti SMP, SIAP dan SIPTL, serta beberapa aplikasi pendukung seperti aplikasi persuratan internal, JASMIN, aplikasi presensi dan aktivitas pegawai, KelolaTugas, aplikasi database pegawai, SISDM, dan aplikasi-aplikasi pendukung aktivitas pelaksanaan kinerja lainnya.

2. Pengelolaan BMN

Beberapa upaya efisiensi terkait pengelolaan BMN yang telah dilakukan adalah dengan melakukan inventarisir atas aset berdasarkan masa manfaat, nilai ekonomis, dan kondisi barang. Hasil inventarisir ini kemudian akan diusulkan untuk dilakukan perbaikan atau penghapusan. Hal ini menyebabkan biaya pemeliharaan atas aset tersebut menjadi lebih ekonomis. Efisiensi atas biaya pemeliharaan tersebut selanjutnya dialokasikan untuk perolehan aset baru atau untuk melaksanakan kegiatan operasional perkantoran lainnya yang lebih *essential*, seperti pembayaran listrik dan sebagainya.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Mengoptimalkan penggunaan TI dalam mendukung kegiatan perkantoran berdampak positif terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran, selain itu mengurangi biaya yg bersifat pelaksanaan tupoksi seperti jamuan rapat, pengurangan biaya transport lokal. Selain itu adanya efisiensi biaya honor krna implementasi JF keuangan dan PBJ, mengurangi biaya perjalanan dinas luar kota yg bersifat koordinasi dan konsultasi.

D. Perubahan Budaya Kerja

Ketercapaian IKU secara langsung memberikan dampak terhadap pembentukan budaya kerja pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu diperkuat dengan telah dicanangkannya budaya kerja **PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Independen)** sebagai bagian kampanye pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kinerja yang positif, misalnya pada indikator Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan dan Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, berhasil mendorong terjadinya internalisasi budaya kerja pada aspek **profesionalisme** pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, capaian kinerja lainnya yang juga dapat mendorong intenalisasi budaya kerja kepada pegawai adalah Hasil Evaluasi AKIP (berpengaruh terhadap aspek **Akuntabilitas**), Implementasi Nilai Dasar BPK (berpengaruh terutama terhadap aspek **Independensi**), Tingkat Kinerja Anggaran (berpengaruh terhadap aspek **Transparansi**), Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (berpengaruh terhadap aspek **Sinergis**).

E. Realisasi Anggaran

Seperti yang telah dijelaskan di Bab I, pada Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memperoleh pagu anggaran sebesar Rp17.473.624.000,00. Alokasi pagu anggaran tersebut terdistribusi pada 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pada Triwulan IV, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan realisasi sebesar Rp17.208.507.922 atau 98,84%. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja sebagaimana tabel 3.30 berikut.

Tabel 3.31 Rincian Realisasi Anggaran

No	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output		Indikator Kinerja
1	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	98.224.068	74	LHP	1. Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	2.688.587.025	15	LHP	2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
3	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1.672.748.720	14	LHP	3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
4	Layanan Manajemen Pemeriksaan	174.166.316	12	Laporan	4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
5	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	104.961.480	16	Laporan	5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	64.311.800	16	Laporan	6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
7	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.553.000	1	Bahan Pendapat	
8	Sumbangan IHPS Perwakilan	58.644.442	2	Sumbangan IHPS	
9	Menyusun Laporan Profil Entitas	-	8	Profil Entitas	
10	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10.329.909.072	1	Bulan Layanan	1. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
11	Layanan Sarana Internal	467.506.859	34	Unit	2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
12	Layanan Prasarana Internal	105.000.000	1	Unit	3. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
13	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.442.895.140	20	Laporan	4. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
					5. Tingkat Kinerja Anggaran
					6. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
					7. Hasil Evaluasi AKIP
	Total	17.208.507.922	214		

F. Inovasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau banyak melakukan terobosan inovasi khususnya dalam bidang pelayanan publik, yaitu pengembangan aplikasi B>Welcome. Aplikasi B>Welcome dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan respon tanggapan bagi *stakeholder* yang ingin mendapatkan layanan informasi publik dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupa konsultasi atau diskusi, program magang maupun kerjasama lain di bidang pemeriksaan atau keuangan daerah. Aplikasi B>Welcome ditampilkan pada *website* BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (https://Perwakilan_Provinsi_Kepulauan_Riau.bpk.go.id/bwelcome/) sehingga publik dapat menyampaikan langsung layanan apa yang dibutuhkan dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, inovasi ini juga dirancang sebagai upaya pengendalian atas kemungkinan terjadinya *conflict of interest* maupun potensi terjadinya pemberian gratifikasi manakala layanan yang diberikan melibatkan para pemeriksa.

Aplikasi B>Welcome juga telah diajukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau kepada Direktorat Utama Revbang dan telah diakui sebagai salah satu *Best Practice* yang ada di BPK. Tujuan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengajukan inovasi ini sebagai *Best Practice* adalah agar inovasi ini dapat dilembagakan sekaligus menjadi inspirasi bagi satker lain di BPK untuk dapat mengaplikasikannya di satker masing-masing.

G. Perhargaan

Selama tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih beberapa penghargaan, antara lain:

1. Terbaik ke-III Pengelola BMN se-Kepulauan Riau
2. Satker berpredikat WBK Tahun 2022

Penghargaan ini selain merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh pelaksana di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tetapi juga bentuk pengakuan atas capaian kinerja dan prestasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam upayanya mencapai visi organisasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau yang sekarang disebut sebagai Laporan Kinerja, disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai cerminan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Sebagai bagian dari AKN V dan BPK RI, cerminan kinerja ini juga menjadi sumbangan atas kinerja AKN V dan BPK RI. Secara umum capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan memperoleh skor pencapaian kinerja tahun 2021 sebesar **100,51**. Skor tersebut meningkat sebesar 0,14 poin bila dibandingkan skor pencapaian kinerja tahun 2021 yakni sebesar **100,37**.

Secara ringkas dari 13 indikator kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berhasil mencapai atau bahkan mampu melebihi target yang ditetapkan pada 11 indikator, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja yang Mencapai Target

No.	Kode	Uraian
1	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
2	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
3	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
4	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
5	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
6	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
7	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP
8	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
9	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
10	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
11	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran

Sementara itu, hanya ada dua indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target

No.	Kode	Uraian
1	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut yakni.

1. Perumusan format LHP yang belum sepenuhnya ringkas dan informatif (*full disclosure*);
2. *IT Culture* yang belum sepenuhnya dipahami urgensi dan manfaatnya oleh seluruh pegawai.

Atas indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan beberapa tindak lanjut perbaikan antara lain.

1. Penyempurnaan proses perencanaan, misalnya dengan melakukan.
 - a. Pembagian tugas penyusunan materi untuk program pemeriksaan secara lintas tim;
 - b. Merumuskan format LHP yang ringkas dan informatif (*full disclosure*) untuk pelaporan;
2. Membuka ruang kontribusi entitas untuk menyediakan data dan informasi sebagai salah satu bahan untuk penentuan area pemeriksaan;
3. Optimalisasi implementasi aplikasi SIAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan);
4. Implementasi sistem kerja yang mengedepankan pemanfaatan aplikasi pendukung perkantoran, baik bidang pemeriksaan maupun bidang kesekretariatan; dan
5. Kampanye internal oleh para pimpinan, dengan dibantu oleh para atasan unit kerja, melalui kanal media sosial internal perwakilan (*Whatsapp group*) dan melalui *e-mail blast* yang ditujukan ke alamat *e-mail* pribadi setiap pegawai, terkait urgensi dan himbauan untuk memanfaatkan aplikasi pendukung perkantoran.

Dengan penyusunan laporan kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Laporan Kinerja juga menjadi dasar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun target pencapaian kinerja pada tahun berikutnya. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan tetap berbenah dan terus meningkatkan kinerja perwakilan pada masa yang akan datang.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masmudi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Kepulauan Riau Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

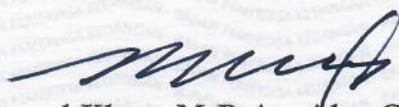


INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

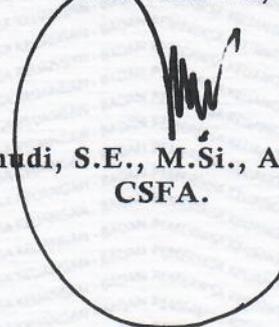
Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,



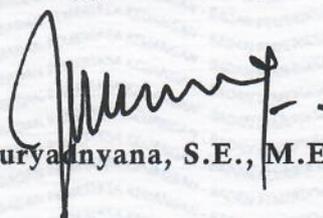
**Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE.,
CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.**

Pihak Pertama,



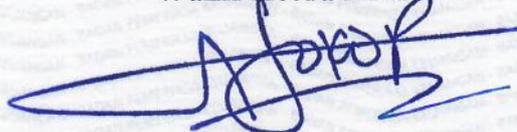
**Masmudi, S.E., M.Si., Ak., CA.,
CSFA.**

Diketahui oleh:
Plt. Anggota V BPK,



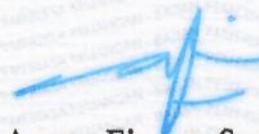
Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Wakil Ketua BPK



**Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,
CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.**

Ketua BPK,



**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.,
CFrA., CGCAE., QGIA.**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 004
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 890676

Waktu Olap: 2023-01-12 15:40:43.0 [B@11a9f6c3
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 12/01/23 9:15 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	17,473,624,000	17,208,507,922	(265,116,078)	98	18,497,766,000	18,056,705,628	441,060,372	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

Lampiran Nota Dinas Kepala Perwakilan
 BPK Provinsi Kepulauan Riau
 Nomor : 69/ND/XVIII.TJP/03/2022
 Tanggal : 31 Maret 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun : 2022

A. Target Kinerja Utama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan LKPD TA 2021 dan pemeriksaan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Tahun 2022 dan pemeriksaan Interim LKPD TA 2021 atas 8 entitas Optimalisasi penggunaan aplikasi SiAP pada Pendahuluan Kinerja Tahun 2022 dan pemeriksaan Interim LKPD TA 2021 atas 8 entitas 	
							<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming, diskusi mingguan dan diskusi pembahasan hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan pada pemeriksaan Terinci Kinerja Tahun 2022 dan pemeriksaan Terinci LKPD TA 2021 atas 8 entitas Meningkatkan QA dari PSP melalui diskusi pembahasan hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada pemeriksaan Kinerja Tahun 2022 dan pemeriksaan LKPD TA 2021 atas 8 entitas Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pada pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Tahun 2022 dan pemeriksaan Interim LKPD TA 2021 atas 8 entitas Optimalisasi penggunaan aplikasi SiAP pada pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Tahun 2022 dan pemeriksaan Interim LKPD TA 2021 atas 8 entitas 	
							<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Kinerja dan DTT Tahun 2022 sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan pendahuluan Kinerja dan DTT Tahun 2022 Optimalisasi penggunaan aplikasi SiAP pada pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan DTT Tahun 2022 	
							<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming, diskusi mingguan dan diskusi pembahasan hasil pemeriksaan dalam rangka 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p>penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada pemeriksaan Terinci Kinerja dan DTT Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan QA dari PSP melalui diskusi pembahasan hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada pemeriksaan Kinerja dan DTT Tahun 2022 Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci Kinerja dan DTT Tahun 2022 Optimalisasi penggunaan aplikasi SiAP pada pemeriksaan Terinci Kinerja dan DTT Tahun 2022
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester I Tahun 2022 Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) Pendahuluan Kinerja Tahun 2022 dan pemeriksaan Interim LKPD TA 2021 atas 8 entitas Penyusunan LHP Pendahuluan Kinerja Tahun 2022 dan LHP Interim LKPD TA 2021 atas 8 entitas <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) Terinci Kinerja Tahun 2022 dan Terinci LKPD TA 2021 atas 8 entitas Penyusunan LHP Kinerja Tahun 2022 dan LHP LKPD TA 2021 atas 8 entitas <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2022 Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) Pendahuluan Kinerja dan DTT Tahun 2022 Penyusunan LHP Pendahuluan Kinerja dan DTT Tahun 2022 <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) Terinci Kinerja dan DTT Tahun 2022 Penyusunan LHP Kinerja dan DTT Tahun 2022
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Hasil Pemeriksaan							<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). • Komunikasi intensif Pimpinan Perwakilan kepada entitas Pemda dalam setiap kesempatan pertemuan untuk mendorong penyelesaian TL
								<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL • Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL • Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). • Menggelar forum pembahasan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Semester I 2022 • Penyusunan Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (DRTLHP) BPK Kepri Semester I 2022 • Penyusunan IHPS (Sumbangan IHPS) BPK Kepri Semester I 2022 • Himbauan Kepala Perwakilan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota dalam acara penyerahan LHP Kinerja Tahun 2022 dan LKPD TA 2021 mengenai tanggung jawab entitas Pemda untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL • Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL • Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). • Komunikasi intensif Pimpinan Perwakilan kepada entitas Pemda dalam setiap kesempatan pertemuan untuk mendorong penyelesaian TL

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). Menggelar forum pembahasan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Semester I 2022 Penyusunan Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (DRTLHP) BPK Kepri Semester I 2022 Penyusunan IHPS (Sumbangan IHPS) BPK Kepri Semester I 2022 Himbauan Kepala Perwakilan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota dalam acara penyerahan LHP Kinerja Tahun 2022 dan LKPD TA 2021 mengenai tanggung jawab entitas Pemda untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional dalam RKP Tahun 2022 Memastikan ketersediaan alokasi sumber daya manusia untuk pemeriksaan tematik nasional dalam RKP Tahun 2022 <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional Melakukan pembahasan terkait kemungkinan dilakukannya revisi atas rencana pemeriksaan tematik nasional (penambahan atau pengurangan) Memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional dalam RKP Tahun 2022 apabila dilakukan revisi (penambahan atau pengurangan) Memastikan ketersediaan alokasi sumber daya manusia untuk pemeriksaan tematik nasional dalam RKP Tahun 2022 apabila dilakukan revisi (penambahan atau pengurangan) Melakukan revisi atas RKP Tahun 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional Penyusunan P2 dan Surat Tugas pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP Tahun 2022 Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP Tahun 2022 Memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional dalam RKP Tahun 2022 Memastikan ketersediaan alokasi sumber daya manusia untuk pemeriksaan tematik nasional dalam RKP Tahun 2022 Penyusunan LHP Pendahuluan Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP Tahun 2022 <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Terinci Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP Tahun 2022 Penyusunan LHP Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Nasional sesuai dengan RKP Tahun 2022 Surat Keluar Penyampaian LHP Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Pemeriksaan dari pemangku kepentingan Evaluasi internal atas kelayakan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Melakukan perencanaan anggaran jika permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Melakukan perencanaan pengalokasian tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Nota Dinas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan kepada Auditorat Utama Investigasi atau AKN V jika permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dinilai layak Melakukan revisi atas RKP Tahun 2022
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nota Dinas persetujuan pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan dari Tortama Investigasi atau dari Tortama KN V Memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan dalam RKP Tahun 2022 Memastikan ketersediaan alokasi sumber daya manusia untuk pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan dalam RKP Tahun 2022 Penyusunan P2 dan Surat Tugas Pemeriksaan atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan Penyusunan LHP atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Surat Keluar Penyampaian LHP atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal dalam RKP Tahun 2022 Memastikan ketersediaan alokasi sumber daya manusia untuk pemeriksaan tematik lokal dalam RKP Tahun 2022 <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembahasan terkait kemungkinan dilakukannya revisi atas rencana pemeriksaan tematik lokal (penambahan atau pengurangan)

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							<ul style="list-style-type: none"> Memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal dalam RKP Tahun 2022 apabila dilakukan revisi (penambahan atau pengurangan) Memastikan ketersediaan alokasi sumber daya manusia untuk pemeriksaan tematik lokal dalam RKP Tahun 2022 apabila dilakukan revisi (penambahan atau pengurangan) Melakukan revisi atas RKP Tahun 2022 	
							<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal Penyusunan P2 dan Surat Tugas pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP Tahun 2022 Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP Tahun 2022 Memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal dalam RKP Tahun 2022 Memastikan ketersediaan alokasi sumber daya manusia untuk pemeriksaan tematik lokal dalam RKP Tahun 2022 Penyusunan LHP Pendahuluan Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP Tahun 2022 	
							<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Terinci Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP Tahun 2022 Penyusunan LHP Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Lokal sesuai dengan RKP Tahun 2022 Surat Keluar Penyampaian LHP Kinerja dan atau DTT Tahun 2022 yang masuk kategori sebagai Pemeriksaan Tematik Lokal 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan (Monitoring Benturan Kepentingan) dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD Pengarahan Kepala Perwakilan menjelang Pemeriksaan Semester I 2021 terkait nilai dasar dan visi misi BPK Himbauan Kepala Perwakilan kepada para pejabat struktural dalam rapat-rapat rutin untuk senantiasa memberikan contoh teladan yang baik dalam penerapan nilai dasar BPK sekaligus menghimbau para pegawai yang ada di unit kerja masing-masing untuk senantiasa menerapkan nilai dasar BPK dalam aktivitas sehari-hari dimanapun berada. Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja BPK Kepri yaitu PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparansi, dan Integritas) dalam setiap kesempatan tatap muka antara Pimpinan Perwakilan dengan para pegawai di lingkungan BPK Kepri <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Pakta Integritas oleh seluruh Tim Pemeriksa menjelang pelaksanaan pemeriksaan terinci LKPD TA 2021 Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja BPK Kepri yaitu PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparansi, dan Integritas) dalam setiap kesempatan tatap muka antara Pimpinan Perwakilan dengan para pegawai di lingkungan BPK Kepri Himbauan Kepala Perwakilan kepada para pejabat struktural dalam rapat-rapat rutin untuk senantiasa memberikan contoh teladan yang baik dalam penerapan nilai dasar BPK sekaligus menghimbau para pegawai yang ada di unit kerja masing-masing untuk senantiasa menerapkan nilai dasar BPK dalam aktivitas sehari-hari dimanapun berada <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengarahan Kepala Perwakilan menjelang Pemeriksaan Semester II 2022 terkait nilai dasar dan visi misi BPK

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<ul style="list-style-type: none"> Himbauan Kepala Perwakilan kepada para pejabat struktural dalam rapat-rapat rutin untuk senantiasa memberikan contoh teladan yang baik dalam penerapan nilai dasar BPK sekaligus menghimbau para pegawai yang ada di unit kerja masing-masing untuk senantiasa menerapkan nilai dasar BPK dalam aktivitas sehari-hari dimanapun berada Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja BPK Kepri yaitu PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparansi, dan Integritas) dalam setiap kesempatan tatap muka antara Pimpinan Perwakilan dengan para pegawai di lingkungan BPK Kepri
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Himbauan Kepala Perwakilan kepada para pejabat struktural dalam rapat-rapat rutin untuk senantiasa memberikan contoh teladan yang baik dalam penerapan nilai dasar BPK sekaligus menghimbau para pegawai yang ada di unit kerja masing-masing untuk senantiasa menerapkan nilai dasar BPK dalam aktivitas sehari-hari dimanapun berada Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja BPK Kepri yaitu PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparansi, dan Integritas) dalam setiap kesempatan tatap muka antara Pimpinan Perwakilan dengan para pegawai di lingkungan BPK Kepri
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022 Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2021 Notula Rapat terkait pembahasan target IKU Tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022 Penyusunan SKP Perencanaan Tahun 2022 para Pejabat Struktural Penyusunan Perjanjian Kinerja Pegawai Tahun 2022 Mengunggah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2022 serta Laporan Kinerja Tahun 2021 di <i>website</i> perwakilan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Mengunggah Perjanjian Kinerja Tahun 2022 di portal perwakilan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi Penyusunan Notula Rapat terkait pembahasan pencapaian kinerja Triwulan I 2022 Penyampaian Laporan Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022 <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi Penyusunan Notula Rapat terkait pembahasan pencapaian kinerja Triwulan II 2022 Penyampaian Laporan Pencapaian Kinerja Triwulan II 2022 <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi Penyusunan Notula Rapat terkait pembahasan pencapaian kinerja Triwulan III 2022 Penyampaian Laporan Pencapaian Kinerja Triwulan III 2022
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	96%	96%	96%	96%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Himbauan untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi internal BPK (e-mail, e-drive, SiAP LK, Portal perwakilan, SISDM, SMP, e-audit, SIPTL, Aplikasi Manajemen Pengetahuan) melalui acara pengarahan, bimbingan dan atau sosialisasi oleh Pimpinan Perwakilan kepada seluruh pegawai Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Himbauan untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi internal BPK (e-mail, e-drive, SiAP LK, Portal perwakilan, SISDM, SMP, e-audit,

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p>SIPTL, Aplikasi Manajemen Pengetahuan) melalui acara pengarahan, bimbingan dan atau sosialisasi oleh Pimpinan Perwakilan kepada seluruh pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Himbauan untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi internal BPK (e-mail, e-drive, SiAP LK, Portal perwakilan, SISDM, SMP, e-audit, SIPTL, Aplikasi Manajemen Pengetahuan) melalui acara pengarahan, bimbingan dan atau sosialisasi oleh Pimpinan Perwakilan kepada seluruh pegawai Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Himbauan untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi internal BPK (e-mail, e-drive, SiAP LK, Portal perwakilan, SISDM, SMP, e-audit, SIPTL, Aplikasi Manajemen Pengetahuan) melalui acara pengarahan, bimbingan dan atau sosialisasi oleh Pimpinan Perwakilan kepada seluruh pegawai Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	25%	25%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan: Forum Berbagi Pengetahuan Unit kerja pelaksana: Subbagian SDM Topik: Manajemen Pelaporan LHKPN dan LHKASN Pegawai / Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat Pegawai <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan: Reviu Pasca Aktivitas Unit kerja pelaksana: Subbagian Hukum Topik: Reviu atas pelaksanaan Replikasi Best Practice Layanan Konsultasi Hukum Online pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan: Coaching Unit kerja pelaksana: Subbagian Humas dan TU Kalan Topik: Pengelolaan Tamu dan Protokoler dalam Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan topik Best Practice yang akan direplikasi Ujicoba penerapan atas Best Practice yang direplikasi
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan: Bantuan Rekan Sejawat Unit kerja pelaksana: Subauditorat Topik: Penatausahaan arsip aktif dan nonaktif/Tips pelaksanaan pemeriksaan konstruksi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penerapan Replikasi Best Practice
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit Pengarahan Kepala Perwakilan menjelang Pemeriksaan Semester I 2022 Pelayanan prima atas setiap permohonan diskusi dari entitas pemeriksaan maupun dari instansi pemerintah lainnya termasuk elemen masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan publik yaitu B'Welcome dan Bagimu Optimalisasi berbagai jenis saluran komunikasi dengan pemangku kepentingan (media sosial, nomor <i>hotline whatsapp</i>, aplikasi e-PPID) Penyampaian kuisisioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik BPK Kepri. Kuisisioner disampaikan kepada para pemohon informasi publik, para siswa PKL/magang di Kantor Perwakilan serta para peneliti/mahasiswa yang melakukan penelitian di perwakilan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit Pelayanan prima atas setiap permohonan diskusi dari entitas pemeriksaan maupun dari instansi pemerintah lainnya termasuk

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
								<p>elemen masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan publik yaitu B>Welcome dan Bagimu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi berbagai jenis saluran komunikasi dengan pemangku kepentingan (media sosial, nomor <i>hotline whatsapp</i>, aplikasi e-PPID) • Penyampaian kuisisioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik BPK Kepri. Kuisisioner disampaikan kepada para pemohon informasi publik, para siswa PKL/magang di Kantor Perwakilan serta para peneliti/mahasiswa yang melakukan penelitian di perwakilan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit • Pengarahan Kepala Perwakilan menjelang Pemeriksaan Semester II 2022 • Pelayanan prima atas setiap permohonan diskusi dari entitas pemeriksaan maupun dari instansi pemerintah lainnya termasuk elemen masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan publik yaitu B>Welcome dan Bagimu • Optimalisasi berbagai jenis saluran komunikasi dengan pemangku kepentingan (media sosial, nomor <i>hotline whatsapp</i>, aplikasi e-PPID) • Penyampaian kuisisioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik BPK Kepri. Kuisisioner disampaikan kepada para pemohon informasi publik, para siswa PKL/magang di Kantor Perwakilan serta para peneliti/mahasiswa yang melakukan penelitian di perwakilan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit • Pengarahan Kepala Perwakilan menjelang Pemeriksaan Semester I 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
																<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan prima atas setiap permohonan diskusi dari entitas pemeriksaan maupun dari instansi pemerintah lainnya termasuk elemen masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan public yaitu B*Welcome dan Bagimu • Optimalisasi berbagai jenis saluran komunikasi dengan pemangku kepentingan (media sosial, nomor <i>hotline whatsapp</i>, aplikasi e-PPID) • Penyampaian kuisisioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik BPK Kepri. Kuisisioner disampaikan kepada para pemohon informasi publik, para siswa PKL/magang di Kantor Perwakilan serta para peneliti/mahasiswa yang melakukan penelitian di perwakilan
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,4	Desember	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Pelaksanaan Diklat Pemeriksaan LKPD untuk seluruh pemeriksa di Kantor Perwakilan <p>Februari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai Januari 2022 <p>Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I		TW II		TW III		TW IV			
												<ul style="list-style-type: none"> Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai Februari 2022
												<p>April:</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai Maret 2022
												<p>Mei:</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai April 2022
												<p>Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai Mei 2022
												<p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai Juni 2022
												<p>Agustus:</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai Juli 2022
								<p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai Agustus 2022 • Pelaksanaan Diklat/Workshop/In-House Training untuk seluruh pegawai di Kantor Perwakilan
								<p>Oktober:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai September 2022
								<p>November:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai Oktober 2022
								<p>Desember:</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Monitoring jumlah jam pelatihan yang telah diikuti oleh para pegawai November 2022
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%	88%	88%	88%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA 2021 dan kebijakan pelaksanaan anggaran TA 2022 • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output • Pelaksanaan RKP dan RKSP TA 2022 • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKP dan RSKP Triwulan I 2022 • Revisi RKP dan RKSP Triwulan I 2022 <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output • Pelaksanaan RKP dan RKSP TA 2022 • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKP dan RSKP Triwulan II 2022 • Revisi RKP dan RKSP Triwulan II 2022 • Penyusunan RKP dan RKSP TA 2023 <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran Semester I TA 2022 • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output • Pelaksanaan RKP dan RKSP TA 2022 • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKP dan RSKP Triwulan III 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Revisi RKP dan RKSP Triwulan III 2022 • Pembahasan RKP dan RKSP 2023 • Penyusunan Prognosis 2024
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output • Pelaksanaan RKP dan RKSP TA 2022 • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKP dan RSKP Triwulan IV 2022 • Revisi RKP dan RKSP Triwulan IV 2022 • Penginputan RKP dan RKSP 2023 • Penyampaian Prognosis 2024

Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	
	INDIKATOR KINERJA GENERIK								
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)		
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)		
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%		
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%		
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)		
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%			